

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajardan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara¹. Dalam Kamus Besar Bahasa, pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, hingga memiliki arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan².

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab³. Dalam pelaksanaannya sistem pendidikan di Indonesia memiliki delapan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Standar isi,
2. Standar proses,
3. Standar kompetensi lulusan,

¹Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Pendidikan, hlm 2.

²<https://www.zonareferensi.com/pengertian-pendidikan/> diakses 12 maret 2019

³Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan,
5. Standar sarana dan prasarana,
6. Standar pengelolaan,
7. Standar pembiayaan, dan
8. Standar penilaian pendidikan.

Pemenuhan standar pendidikan ini sangat bergantung pada kualitas pendidik yaitu guru dan kepala sekolah sebagai faktor utama yang mengelola dan menjalankan pendidikan di Sekolah. Sehubungan dengan standar nasional pendidikan, pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai upaya memberikan panduan dan pedoman bagi pengelola pendidikan dalam penyelenggaraan pengawasan sekolah diatur penyelenggaraan pengawas sekolah.

Di Indonesia, pengawas sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan Fungsional Pengawas sekolah dan angka kreditnya, pengawas sekolah merupakan perpanjangan tangan disetiap dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Kota Padang. Untuk mendukung pelaksanaan jabatan pengawas sekolah Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Walikota Padang nomor 31 tahun 2013 tentang Pengawas Sekolah sedangkan yang bertugas menjalankan kegiatan pengawasan adalah pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kota Padang.

Pengawas sekolah diduduki oleh guru berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik untuk guru dan manajerial pada kepala sekolah. Memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang

meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Tugas pokok pengawas sekolah dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :



Tabel. 1.1 Rincian Tugas Pokok Pengawas Sekolah

No	Rincian kegiatan	Pengawas muda	Pengawas madya	Pengawas utama
1	Menyusun program pengawasan	√	√	√
2	Melaksanakan pembinaan guru	√	√	√
3	Melaksanakan pembinaan kepala sekolah		√	√
4	Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian	√	√	√
5	Memantau pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan		√	√
6	Melaksanakan penilaian kinerja guru	√	√	√
7	Melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah		√	√
8	Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan	√	√	√
9	Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat provinsi, kabupaten+kota			√
10	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGBK dan sejenisnya	√	√	√
11	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah di Kkks/Mkks dan sejenisnya		√	√
12	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru	√	√	√
13	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah		√	√
14	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi dan manajemen		√	√
15	Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru	√	√	√
16	Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah		√	√
17	Membimbing pengawas muda dalam melaksanakan tugas pokok		√	√
18	Membimbing pengawas madya dalam melaksanakan tugas pokok			√
19	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) dan/atau penelitian tindakan sekolah (PTS)			√
20	Melaksanakan tugas pengawasan di daerah khusus	√	√	√
21	Pengembangan profesi (menyusun karya tulis ilmiah dan/atau penerjemahan/penyaduran buku dan/atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal / pengawasan dan/atau membuat karya inovatif)	√	√	√

Sumber (olahan peneliti, 2018) : Perwako Padang no 31 tahun 2013

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pengawas sekolah dilaksanakan dengan mengacu kepada program pengawasan yang telah disusun sebelumnya untuk

menjamin kelancaran kegiatan pengawas sekolah. Program pengawasan pengawas SMP di Kota Padang ini memuat⁴ :

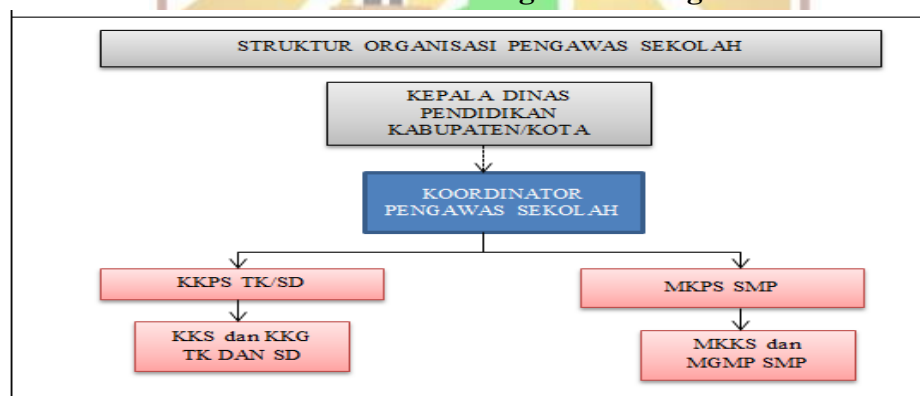
1. Kegiatan penilaian kinerja guru oleh pengawas manajerial dengan penilaian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian kompetensi guru; sedangkan yang dilakukan untuk kepala sekolah penilaian dilakukan melihat bagaimana kepala sekolah dalam memimpin guru dan tenaga kependidikan lain untuk mewujudkan rencana pengembangan sekolah, menciptakan iklim belajar yang kondusif , dan mengelola anggaran, mengelola sarana dan prasarana, sistem teknologi informasi dan kurikulum di sekolah bersangkutan .
2. Kegiatan pembinaan pengawas sekolah dilakukan oleh pengawas manajerial sekolah untuk pengawasan tugas kepala sekolah dalam mengelola kurikulum, keuangan, sarana prasarana dan kepegawaian serta pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik; dan pengawasan akademik untuk membina dan mengembangkan kemampuan semua guru dalam proses pembelajaran disekolah bersangkutan.
3. Pemantauan delapan standar nasional pendidikan dilakukan berkaitan dengan pemantauan administrasi sekolah, pemantauan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan, penataan lingkungan sekolah, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional, penerimaan siswa baru, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, dan pengelolaan sarana sekolah melalui tugas guru dan kepala sekolah.

⁴Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pengawas Sekolah

4. Pelatihan profesional guru berdasarkan mata pelajaran dilakukan oleh pengawas akademik yang diberikan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sesuai bidang studi yang diampu.
5. Evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan dilakukan diakhir semester dan akhir tahun ajaran disampaikan kepada semua guru dan sekolah binaan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.

Dalam struktur Dinas Pendidikan Kota Padang, pengawas sekolah berada langsung dibawah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang,, adapun struktur dalam dinas pendidikan yang berperan dalam pengawasan sekolah adalah pengawas sekolah masuk ke dalam jabatan fungsional yang berada langsung di bawah garis komando Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengawas Sekolah



Dari gambar 1.1 terlihat pengawas sekolah yang berada di bawah Kepala Dinas Pendidikan memiliki organisasi yang dipimpin oleh seorang koordinator pengawas, yang mengkoordinir semua kegiatan pengawas sekolah. Koordinator pengawas sekolah dipilih secara demokratis oleh seluruh pengawas sekolah dengan masa jabatan 4 tahun. Koordinator pengawas memiliki tugas :

- (1) Mengatur pembagian tugas pengawas,
- (2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawas sekolah,
- (3) Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan pengawas,
- (4) Melaporkan hasil kegiatan pengawasan sekolah kepada kepala dinas,
- (5) Mengusulkan angka kredit dan
- (6) Menghimpun dan menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para pengawas kepada Kepala Dinas.

Laporan hasil pengawasan oleh pengawas diberikan kepada kepala dinas pendidikan Kota Padang tiap akhir tahun ajaran. Namun, didalamnya tidak memuat jumlah guru yang diawasi, tidak memuat jumlah guru yang mendapat pembimbingan dan pelatihan profesional dan jumlah guru bermasalah.

Pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kota Padang merupakan pengawas sekolah untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) hanya mendapatkan pengawasan akademik sedangkan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) mendapatkan pengawasan akademik dan manajerial. Untuk melihat pelaksanaan tugas pengawas sekolah peneliti memilih lokus penelitian pada jenjang pendidikan Sekolah menengah pertama (SMP). Jumlah SMP di Kota Padang berjumlah 95 sekolah dengan 42 sekolah negeri dan 53 sekolah swasta.

Tabel 1.2
Lokus Penelitian

No	Nama sekolah	Status sekolah	Jumlah guru
1	SMP N 12 Padang	Negeri	63
2	SMP N 40 Padang	Negeri	18
3	SMP Adabiah	Swasta	36
4	SMP Taman siswa	swasta	12

Sumber : Data jumlah SMP Dinas Pendidikan Kota Padang (olahan peneliti 2019)

Peneliti memilih sekolah dengan jumlah guru paling banyak dan paling sedikit sebagai lokasi penelitian karena ingin melihat apakah jumlah gurumempengaruhi kegiatan pengawasan.

Dalam Pengangkatan pengawas sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang dengan persyaratan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Syarat Pengangkatan Pengawas Sekolah / Madrasah

Kualifikasi	Jenis Pengawas Sekolah		
	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs
Pendidikan	S-1/D-IV kependidikan		S2 kependidikan dengan berbasis S1 dalam rumpun mata pelajaran
Sertifikat pendidik	Sertifikat guru TK/RA+8 tahun masa kerja sebagai guru atau 4 tahun sebagai kepala sekolah	Sertifikat guru SD/MI +8 tahun masa kerja sebagai guru atau 4 tahun sebagai kepala sekolah	Sertifikat guru SMP/MTs +8 tahun masa kerja sebagai guru atau 4 tahun sebagai kepala sekolah
Pangkat	Memiliki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/C;		
Usia	Berusia paling tinggi 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;		
Kompetensi Pengawas	Memenuhi kompetensi pengawas satuan pendidikan diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;		
Lulus seleksi	Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan		

Sumber: Peraturan Walikota Padang nomor 31 tahun 2013

Dari tabel 1.3 terlihat syarat yang harus dipenuhi seorang pengawas sekolah untuk tiap jenjang pendidikan yaitu memiliki sertifikat pendidik dan pengalaman kerja minimal 8 tahun menjadi guru dan 4 tahun menjabat menjadi kepala sekolah,

memenuhi usia maksimal 50 tahun dan pangkat minimal penata gol.ruang III/C, dan memiliki kompetensi serta lulus seleksi pengawas sekolah. Hal ini menandakan pengawas sekolah berpengalaman dan mampu lulus seleksi. Dalam pengangkatan pengawas sekolah perbedaan hanya terdapat pada kualifikasi pendidikan minimal yang dimiliki oleh pengawas SMP yang harus memiliki kualifikasi minimal S2, sedangkan pengawas TK dan SD kualifikasi pendidikan minimal S1. Berikut ini adalah jumlah Pengawas sekolah untuk jenjang SMP Kota Padang sebagai berikut :



Tabel 1.4 Kualifikasi dan Jenjang Jabatan Pengawas Sekolah SMP Kota Padang

No	Nama pengawas	Kualifikasi pendidikan		Golongan dan Jenjang jabatan	Tahun		
					2016/2017	2017/2018	2018/2019
1	Drs. H. Aptimar Malik	S1	Keterampilan	IV/a , Pengawas madya	√	-	-
2	Supratman,S.Pd, M.Pd	S2	Penjaskes	IV/a, Pengawas madya	√	-	-
3	Drs.H. Bahrizal	S1	BK	IV/a, Pengawas madya	√	-	-
4	Zainal, S.Pd	S1	BK	IV/a, Pengawas madya	√	-	-
5	Dra. Hj. Yulinar, M.Pd	S2	IPA	IV/a, Pengawas madya	√	√	-
6	Mayetti,S.Pd	S1	Seni Budaya	IV/a, Pengawas madya	√	√	√
7	Drs. Moh. Hatta,M.Pd	S2	KWN	IV/a, Pengawas madya	√	-	-
8	Yunardi,M.Pd	S2	Bahasa Indonesia	IV/a, Pengawas madya	√	√	√
9	Drs. H.Djusman,M.M	S2	Matematika	IV/a, Pengawas madya	√	-	-
10	Drs.Afdalman	S1	Penjaskes	IV/b, Pengawas madya	√	-	-
11	Drs. H. Jupen, M.Pd	S2	IPS	IV/c, Pengawas madya	√	√	√
12	Afrizal,S.Pd, M.M	S2	Matematika	IV/a, Pengawas madya	√	√	√
13	Dra. Hj. Laila Fetma	S1	BK	IV/a, Pengawas madya	√	√	√
14	Drs. Emir Ediza,M.M	S2	IPA	IV/a, Pengawas madya	√	-	-
15	Hj. Zaswirda,S.Pd	S1	IPA	IV/a, Pengawas madya	√	√	√
16	Dra. Hj. Farina Archam,M.M	S2	IPA	IV/a, Pengawas madya	√	√	√
17	H.Maizul,S.Pd	S1	IPS	IV/a, Pengawas madya	√	-	-
18	Drs. Erman	S1	KWN	IV/a, Pengawas madya	√	-	-
19	Drs. H. Z. Amril widana	S1	Bahasa Indonesia	IV/a, Pengawas madya	√	-	-
20	Drs. Edy surya, M.M	S2	IPA	IV/a, Pengawas madya	√	√	-
21	Razali, M.Pd	S2	IPA	IV/a, Pengawas madya	√	√	√
22	Drs. Inda Jaya,M.Pd	S2	Bahasa Indonesia	IV/a, Pengawas madya	√	-	-
23	Yusman,S.Pd	S1	Matematika	IV/c, Pengawas madya	√	√	√
24	Drs.Syafriadi T	S1	BK	IV/b, Pengawas madya	√	-	-

Sumber (olahan peneliti,2019) : Dinas pendidikan Kota Padang

Dari tabel 1.4 terlihat Pengawas jenjang pendidikan SMP dari tahun ajaran 2016/2017 mengalami penurunan jumlah menjadi sepuluh orang dengan jumlah target yang diawasi masih sama yaitu 95 sekolah selain itu Pengawas sekolah hanya terdiri dari pengawas mata pelajaran kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPS, IPA, Seni Budaya, Penjaskes, TIK, dan BK sedangkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Bahasa Inggris, BAM, dan Keterampilan tidak memiliki pengawas akademik. Hal ini menunjukkan pengawas sekolah SMP di Kota Padang masih kekurangan staf pengawas sekolah khusus pengawasan akademik.

Selain itu, dalam pembagian tugas Pengawas sekolah Dinas Pendidikan belum merata. Hal ini terlihat pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor 800/635/dp/sekre-01/2016 tentang pembagian kewenangan pengawas sekolah. Berdasarkan surat keputusan ini terlihat pembagian kewenangan pengawas sekolah untuk semua sekolah SMP baik negeri maupun swasta, sebagian besar guru SMP swasta di Kota Padang tidak memiliki pengawas akademik. Bahkan terdapat dua sekolah negeri baru yaitu SMP N 38, SMP N 39, dan SMP N 40 yang tidak memiliki pengawas untuk kegiatan pengawasan manajerial maupun akademik. Selain itu pada pengawas akademik juga terdapat ketimbangan dalam pembagian kewenangan, hal ini terlihat pada kewenangan pengawas akademik mata pelajaran seni budaya yang mengawasi semua guru seni budaya di semua SMP di Kota Padang.

Tabel 1.4 juga menunjukkan belum memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pengawas sekolah. Pada tahun ajaran 2016/2017 terlihat jumlah pengawas sekolah memiliki kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 12 orang, tahun ajaran 2017/2018 terdapat tiga orang dan tahun 2018 dan 2019 terdapat dua orang pengawas sekolah

masih S1. Berkaitan dengan belum terpenuhinya kualifikasi pengawas sekolah untuk SMP ini, Dinas Pendidikan Kota Padang menjelaskan :

“Memang dari awal syarat pengangkatan pengawas sekolah untuk jenjang pendidikan SMP harusnya S2, namun dilapangan yang memenuhi syarat pengawas dan lulus itu hanya mereka, meskipun belum S2. Yang belum terpenuhi itu hanya kualifikasi pendidikannya saja, sementara yang lain terpenuhi. Tapi kami sudah menghimbau dan koordinator pengawas nya juga sudah mengingatkan pengawas untuk melanjutkan pendidikannya dan sudah diberi kemudahan bagi pengawas yang mau S2 kami tawarkan beasiswa. Lagipula pengawas tiap tahun rutin diberikan pelatihan dan pengembangan oleh dinas pendidikan“(wawancara dalam observasi awal dengan drs. Barlius, M.Pd kepala dinas pendidikan Kota Padang)

Berdasarkan wawancara ini, antara Dinas Pendidikan dan pengawas untuk melanjutkan pendidikan guna memenuhi kualifikasi sebagai pengawas belum berjalan baik. Sehingga dari pengangkatan pengawas yang dilaksanakan pada tahun 2008 pengawas sekolah SMP di kota Padang di mulai, hingga 2017 masih terdapat pengawas yang belum memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Dinas pendidikan mengatakan hal ini masih biasa disiasati.

Dalam menjamin pemenuhan delapan standar pendidikan dibutuhkan kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja guru dan kepala sekolah, dalam peraturan walikota Padang nomor 31 tahun 2013 pengawas sekolah memiliki beban kerja sebanyak 37,5 jam per minggu dengan jam kerja 60 menit.

Tabel 1.5 Data Jumlah Kegiatan Pengawas SMP Kota Padang tahun ajaran 2016/2017

No	Nama Pengawas Sekolah	Bulan												Jumlah
		Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
1	Drs. H. Aptimar Malik	1	2	1	2	2	1	1	4	2	1	2	2	21
2	Supratman, S.Pd, M.Pd	2	3	1	3	4	1	2	1	4	2	2	1	26
3	Drs. H Bahrizal	1	4	2	1	2	2	3	1	3	3	3	2	27
4	Zainal, S.Pd	2	2	3	2	2	3	1	1	4	2	2	1	25
5	Dra. Hj. Yulinar, M.Pd	2	3	2	1	1	1	3	2	5	3	2	2	27
6	Mayetti, S.Pd	3	1	4	2	2	2	1	1	3	4	2	1	26
7	Drs. Moh. Hatta, M.Pd	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	23
8	Yunardi, M.Pd	2	3	3	1	2	2	3	3	2	2	2	1	26
9	Drs. H. Djusman,M.M	3	1	4	1	2	2	2	1	2	3	3	2	28
10	Drs.Afdalman	2	2	2	2	1	3	4	2	4	2	2	2	28
11	Drs. Jupen,M.Pd	2	3	3	2	2	2	4	1	3	3	2	1	27
12	Drs, Afdalman	3	4	4	3	1	2	2	3	2	2	1	1	28
13	Dra. Hj. Laila fetma	1	2	2	1	2	2	2	2	4	2	3	1	24
14	Drs. Emir Ediza, M.M	1	1	1	2	3	1	3	1	2	3	2	2	22
15	Hj. Zaswirda,S.Pd	1	2	2	2	2	2	2	1	4	1	3	2	24
16	Dra. Hj. Farina A, M.M	2	3	3	1	3	1	3	2	3	2	2	1	26
17	H. Maizul, S.Pd	3	1	3	1	1	2	3	1	2	2	1	1	21
18	Drs. Erman	1	3	2	2	2	2	4	2	1	2	1	2	24
19	Drs. Z Amril Widana	2	1	2	2	1	2	4	3	4	3	2	1	27
20	Drs. Eddy Surya, M.M	1	4	1	3	1	1	2	1	3	2	2	2	23
21	Razali,M.Pd	2	1	3	1	2	2	3	1	2	1	2	1	21
22	Drs. Indra Jaya, M.Pd	2	3	4	1	2	2	3	2	1	2	3	2	22
23	Usman, S.Pd	2	2	3	2	1	2	1	3	1	2	2	1	23
24	Drs. Szafriadi T	3	1	2	1	1	2	2	3	1	2	3	2	22

Sumber : olahan peneliti (2018)

Seperti yang dibahas sebelumnya kegiatan tatap muka pengawas minimal dilaksanakan 24 jam pertemuan per minggu. Terlihat pengawas SMP Kota Padang masih belum konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini terlihat dari kunjungan yang dilakukan setiap bulannya. Paling banyak hanya 4 kali dalam satu bulan. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pengawas sekolah untuk semua sekolah dan guru binaannya masih jarang dilakukan. Sementara berkaitan dengan minimnya realisasi kegiatan pengawas sesuai beban kerja pengawas sekolah tersebut, Dinas Pendidikan mengungkapkan hal tersebut bukan menjadi suatu masalah bagi pengawas. Hal ini berdasarkan wawancara dengan koordinator pengawas Kota Padang.

“Absen kegiatan itu hanya dipergunakan untuk menghitung angka kredit tiap pengawas untuk naik jabatan, jadi absen dan jumlah kunjungan ke sekolah binaan tiap pengawas saya atau sekretaris pengawas tidak punya, itu dipegang oleh tiap pengawas. Kalau untuk pelaporan dan syarat kelengkapan pencairan tunjangan profesi pengawas juga tidak memakai absen. Pengawas sekolah, guru dan kepala sekolah saat ini diisi orang-orang yang berpendidikan dan banyak yang sudah bersertifikasi dan berpengalaman, jadi untuk tugas masing-masing mereka pasti sudah tahu. Sedangkan pengawas sudah terlatih dan mampu membawa situasi kapan harus turun melaksanakan pengawasan. (wawancara Survei awal dengan Drs. Jupen, M.Pd selaku koordinator pengawas sekolah Kota Padang)

Berdasarkan wawancara ini terlihat bahwa beban kerja tiap pengawasan di Dinas Pendidikan Kota Padang belum terkontrol karena tidak adanya laporan jumlah kegiatan tiap pengawas untuk koordinator pengawas. Selain itu, jumlah kegiatan juga tidak disertakan dalam laporan kerja dan syarat pencairan tunjangan jabatan pengawas sekolah. Hal ini menjadi salah satu penyebab masalah beban kerja yang belum dipatuhi pengawas dianggap penting. Ditambah lagi adanya anggapan pendidik yang sudah bersertifikasi secara tindak langsung tanpa diawasi pendidik

sudah mengetahui tugasnya masing-masing yang makin mengurangi kemauan implementor dalam melaksanakan pengawasan sekolah secara berkelanjutan.

“....kegiatan pengawasan memang tidak setiap hari dilakukan tapi minimal 1 bulan sekali. Hal ini karena kami sulit menemukan waktu dan lokasi kegiatan karena ketiadaan fasilitas.” (wawancara dengan bapak Drs. Jupen, M.Pd coordinator pengawas sekolah SMP Kota Padang)

Selain fasilitas pengawas sekolah juga tidak mendapatkan insentif dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Padang berdalih belum sesuai kualifikasi sudah digantikan dengan pemberian pelatihan dan pengembangan bagi pengawas secara berkelanjutan bagi pengawasan sekolah dengan anggaran biaya Rp.100.000.000 per tahun untuk mengadakan pelatihan demi meningkatkan kompetensi dan keprofesionalan kerja pengawas sekolah.

Selain itu di lapangan, nilai rata-rata ujian kompetensi guru (UKG) di Kota Padang yang diadakan akhir tahun 2016 lalu hanya mencapai 56,69 untuk semua guru di semua jenjang pendidikan.⁵ Kota Padang sebagai salah satu kota besar di Indonesia sekaligus menjadi ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki 127.268 tenaga pendidik dan 61% diantaranya memiliki sertifikat pendidik. Banyaknya pendidik dan tenaga pendidik bersertifikasi di Kota Padang hanya menempatkan Kota Padang di urutan kesepuluh di Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata 59,91.⁶

Fenomena lain di lapangan masih ditemukan guru bermasalah. Hal ini terlihat berdasarkan temuan Ketua BAP Sumbar Prof Dr Sufyarma Marsidin mengatakan

⁵Neraca Pendidikan Daerah kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tahun 2016

⁶Ibid.,

SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK yang mendapat rapor merah dalam beberapa aspek pendidikan diseluruh daerah di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang. Banyak temuan guru yang *copy paste* dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Sehingga dalam proses belajar mengajar guru tidak tahu materi apa yang akan diajarkan, dan hanya memberikan tugas atau mencatat. Fenomena ini dianggap akibat dari rendahnya pengawasan.⁷

Kegiatan pengawasan di tahun ajaran selanjutnya, bersumber dari temuan masalah dilapangan pada yang disusun dalam program pengawasan ini belum terealisasi sesuai beban kerja pengawas sekolah. Temuan di lapangan banyak pengawas sekolah yang tidak konsisten dalam melakukan tugas pengawasan sesuai beban kerja selama 37,5 jam perminggu. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan pengawas SMP pada tahun 2016 .

Namun untuk pelaksanaan pengawasan manajerial, berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 31 tahun 2013 tentang pengawas sekolah jumlah ini dirasa sanggup melaksanakan pengawasan untuk tingkat SMP dengan tiap pengawas paling sedikit melakukan pengawasan manajerial di 7 sekolah dan pengawasan akademik untuk 40 guru.⁸

Berdasarkan paparan fenomena yang telah peneliti gambarkan, memunculan pertanyaan bagi peneliti bagaimana sebenarnya implementasi Peraturan Walikota

⁷<http://www.padek.co/detail.php?news=40742> sarpras sekolah kurang, kompetensi rendah diakses 13 maret 2016 pukul 12.00

⁸Peraturan Walikota Padang nomor 31 tahun 2013 tentang pengawas sekolah

Padang Nomor 31 tahun 2013 tentang pengawas sekolah di SMP Kota Padang ini peneliti memilih untuk menggunakan teori Edward III.

Kota Padang sebagai Kota dengan jumlah pengawas sekolah paling banyak di Sumatera Barat namun masih tertinggal dalam segi kualitas ini, dalam melaksanakan kebijakan mengenai pengawas sekolah masih peneliti temukan implementor yang tidak konsisten dalam pemenuhan beban kerja minimal pengawas sekolah tiap minggu dan pengangkatan pengawas sekolah.

Di sisi lain, kekurangan staf dan pembagian kewenangan yang tidak merata masih terjadi dan dirasa menjadi penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan ini. Padahal, implementor dari Peraturan Walikota Padang nomor 31 tahun 2013 tentang pengawas sekolah adalah Dinas Pendidikan Kota Padang. Idealnya, implementor yang sama tentu akan memberikan pelayanan yang sama pada semua sekolah dan guru pada tiap jenjangnya. Pentingnya implementasi peraturan Walikota Padang Nomor 31 tahun 2013 tentang pengawas sekolah di SMP Kota Padang ini dilakukan agar dapat mampu meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Kota Padang yang dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Dengan demikian, dari fenomena ini peneliti tertarik untuk membahas pelaksanaan program dengan mendeskripsikan apa saja yang dihadapi dinas pendidikan sebagai implementor, berikut kendala dan strateginya hingga dampak yang terlihat, dalam implementasi Peraturan Walikota padang nomor 31 tahun 2013 tetang pengawas sekolah di SMP Kota Padang ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan peneliti di latar belakang mengenai fenomena dilapangan, dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 31 tahun 2013 tentang pengawas SMP Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Padang nomor 31 tahun 2013 tentang pengawas sekolah di SMP Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sarana mengembangkan khazanah ilmu yang berkaitan dengan ilmu administrasi Negara, khususnya kajian implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan, dan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan deskripsi mengenai implementasi jabatan pengawas sekolah di Kota Padang serta berguna sebagai masukan positif, dan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Kota Padang dalam implementasi peraturan walikota Padang nomor 31 tahun 2013 tentang pengawas sekolah di SMP Kota Padang.

